



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian di Indonesia

Fildzah Darayani Mujasmara<sup>1✉</sup>, Rebecka Tri Talita Panggabean<sup>2</sup>, Rizki Samora Muliana<sup>3</sup>,

Eko Wahyu Nugrahadi<sup>4</sup>, Muammar Rinaldi<sup>5</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email: [fildzahdarayani05@gmail.com](mailto:fildzahdarayani05@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Sejalan dengan tujuan sistem perekonomian nasional, kebijakan fiskal dapat dijadikan sebagai alat utama selain kebijakan moneter, untuk mencapai tujuan nasional terutama yang bersifat ekonomi. Pendekatan kualitatif merupakan proses analisis tanpa menggunakan rumus dan angka yang berasal dari informasi hasil studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional, meningkatkan laju investasi, dan meningkatkan stabilitas perekonomian. Selain itu, dalam mengatasi resesi ekonomi di Indonesia, kebijakan fiskal berperan dalam mendorong tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Kebijakan Fiskal, Perekonomian Indonesia, Stabilitas Ekonomi*

### Abstract

In line with the goals of the national economic system, fiscal policy can be used as the main tool apart from monetary policy, to achieve national goals, especially those of an economic nature. The qualitative approach is an analysis process without using formulas and numbers derived from information from literature studies. The research results show that fiscal policy in developing democracy in Indonesia aims to increase employment opportunities, increase and distribute national income, increase the rate of investment, and increase economic stability. Apart from that, in overcoming the economic recession in Indonesia, fiscal policy plays a role in encouraging the achievement of the development targets that have been set.

Keywords: *Fiscal Policy, Indonesian Economy, Economic Stability*

## PENDAHULUAN

Kebijakan ekonomi sangat penting karena tidak semua kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang ada. Keberadaan kebijakan dalam dunia perekonomian merupakan landasan dari segala kegiatan yang berhubungan dengan dunia perekonomian, baik kecil maupun besar. Oleh karena itu, politik selalu disebutkan dalam ilmu ekonomi, salah satunya adalah kebijakan fiskal. Banyak orang mengemukakan pandangannya mengenai pengertian kebijakan fiskal, seperti Rahayu, Ani Sri (2014), yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau diinginkan dengan melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja pemerintah. Peran negara adalah mengatur kegiatan perekonomian untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat agar tidak mengalami kemiskinan dan pengangguran.

Demikian pula, untuk mencapai tujuan nasional, khususnya dalam memulihkan keadaan perekonomian, kebijakan fiskal dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang ada di Indonesia. Kebijakan fiskal sendiri memiliki dua komponen utama. Komponen pertama adalah komponen penerimaan, termasuk pajak dan non-pajak. Komponen kedua adalah komponen pengeluaran pemerintah. Pada kedua komponen finansial dan non-finansial, yang perlu kita perhatikan adalah pengelolaan keuangan publik harus dikelola secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan negara harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.

Pada dasarnya, perubahan kebijakan fiskal ditentukan oleh partisipasi pemerintah dalam kegiatan perekonomian, sejalan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu hal yang penting adalah penggunaan alat kebijakan fiskal yang tepat. Namun, dalam proses implementasinya, kebijakan fiskal yang telah diterapkan selama ini cenderung dilakukan secara asal-asalan, tanpa perencanaan yang matang, dan tidak sejalan dengan kebijakan pokok, khususnya UUD 1945. Hal ini bertentangan dengan pokok bahasan, terutama UUD 1945.

Adiwarman A. Karim menyebutkan beberapa alasan mengapa pemerintah harus berperan secara proporsional dalam kegiatan perekonomian, khususnya barang kebutuhan sosial yang tergolong barang publik (barang yang cenderung tidak diproduksi/disediakan secara efisien oleh perusahaan swasta dalam jumlah kecil, sehingga penyediaannya sebagian besar dilakukan oleh pemerintah). Barang publik akan lebih efisien jika diproduksi bukan oleh perusahaan swasta, melainkan oleh pemerintah. Dalam masyarakat, terdapat banyak tipe orang dengan tingkat keterampilan dan kemampuan ekonomi yang berbeda-

beda, sehingga kesenjangan merupakan hal yang wajar. Untuk itu, diperlukan keadilan distribusi sumber daya agar kesenjangan ini dapat di perkecil. Pemerintah harus membantu masyarakat yang kurang beruntung. Bantuan dapat dilakukan melalui pajak, sumbangan, hibah, atau bentuk lainnya. Ada pelayanan-pelayanan vital yang dibutuhkan oleh seluruh warga, namun penyelenggaraannya oleh swasta sangat mahal sehingga tidak terjangkau oleh kalangan yang tidak mampu, seperti layanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah negeri yang terjangkau atau memberikan beasiswa bagi yang kurang mampu, serta memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa intervensi pemerintah (negara) yang memadai dan efektif dapat dilaksanakan dalam bentuk kebijakan fiskal.

Hal ini didukung oleh pandangan Keynes bahwa kebijakan pemerintah diperlukan untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Salah satu bentuk intervensi pemerintah yang dapat dilakukan adalah penerapan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu komponen kebijakan publik, yaitu tindakan politik yang diambil oleh pemerintah dan melibatkan pengumpulan dan pengeluaran uang. Menurut Wolfson, kebijakan fiskal mencakup tindakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan pemerintah mengenai pendapatan dan belanja, memobilisasi sumber daya, dan menentukan harga barang dan jasa dalam dunia usaha. Ini adalah pengelolaan pengeluaran dan penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara.

Kebijakan fiskal diartikan sebagai tindakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang (Syamsi, 1983). Kebijakan fiskal Negara Indonesia tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN tersebut, terdapat penetapan alokasi dan distribusi keuangan negara oleh pemerintah. Mengingat urgensi bidang ini dalam pembangunan perekonomian negara, kebijakan fiskal juga berpengaruh terhadap tingkat inflasi.

Berdasarkan hasil penelitian (Surjaningsih, N., Utan, G. A. D., dan Trisnanto, B., 2012), dampak kebijakan fiskal terhadap produksi dan inflasi adalah peningkatan belanja pemerintah berdampak positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara peningkatan pajak memberikan efek penurunan terhadap PDB.

Pengaruh positif belanja pemerintah dan dampak negatif pajak terhadap PDB konsisten dengan teori Keynesian tentang peran negara dalam memajukan perekonomian dan konsisten dengan penelitian empiris yang dilakukan di beberapa negara maju terhadap PDB dibandingkan pajak, menunjukkan bahwa kebijakan ini masih cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada masa resesi terkait pajak. Dampak

belanja pemerintah terhadap penurunan inflasi dapat dijelaskan melalui multiplier effect belanja pemerintah terhadap investasi (termasuk infrastruktur) yang lebih besar dibandingkan belanja saat ini. Belanja pemerintah di bidang infrastruktur akan meningkatkan distribusi barang dan jasa, sehingga membantu mengurangi inflasi.

Menurut pendekatan Keynesian, kebijakan fiskal dapat merangsang perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pengurangan pajak memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang dapat semakin merangsang permintaan rumah tangga terhadap barang konsumsi (fiscuswannabe web id, 2013).

Demikian juga, jika pemerintah memotong pajak untuk merangsang perekonomian, pemotongan pajak tersebut akan meningkatkan pendapatan yang dapat dihabiskan dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan kecenderungan konsumsi marginal (MPC) menjadi saluran ekonomi untuk meningkatkan pengeluaran dan pada akhirnya meningkatkan produksi.

## METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif, yaitu mengkaji dan menelaah sesuai dengan teori yang dibahas khususnya di lingkup konsep peran kebijakan fiskal dalam perekonomian di Indonesia. Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi yang metodologis.

Menurut Saryono (2010) mengungkapkan bahwa studi kualitatif dirancang untuk menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Stabilitas ekonomi yang mantap dan berkesinambungan dapat tercapai dan terpelihara tidak lepas dari peranan kebijakan makroekonomi, yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan investasi, kebijakan industrialisasi, dan kebijakan perdagangan luar negeri dalam kondisi sehat, stabilitas harga dan full-employment tercapai, keseimbangan neraca pembayaran terpelihara sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik dan pencapaian pendapatan nasional dapat menjamin tingkat kesejahteraan yang lebih memadai.

Berbagai kebijakan makroekonomi tersebut dapat digolongkan ke dalam sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter erat kaitannya dengan masalah keuangan, suku

bunga, harga, dan kurs, sementara itu, sektor riil erat kaitannya dengan aspek investasi, produksi, konsumsi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan.

Dari sudut pandang makroekonomi, kebijakan fiskal dibedakan menjadi dua jenis Adiyati, F. S. (2020), yaitu kebijakan fiskal kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal yang ketat bertujuan untuk mengendalikan inflasi yang cepat, sedangkan kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk menstimulasi perekonomian dan menghindari resesi. Dalam kasus dimana perekonomian mengalami overhear akibat peningkatan daya beli masyarakat yang berlebihan, kebijakan fiskal yang ketat berperan dalam mengurangi belanja publik atau meningkatkan penerimaan pajak.

Kebijakan fiskal kontraktif ini bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi penawaran dan permintaan barang dan jasa yang menopang perekonomian. Di sisi lain, dalam kondisi perekonomian yang suram, kebijakan fiskal ekspansif berperan dalam meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan pajak. Kebijakan ekspansif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada.

Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah membenahi APBN dan permasalahan terkait APBN lainnya. Defisit APBN terjadi ketika pendapatan pemerintah lebih kecil dari pengeluaran. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas makroekonomi yang berkaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja/pengangguran, dan keseimbangan gaji.

Apabila APBN mengalami defisit, maka pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk membiayai saldo negatif tersebut, yaitu membiayainya melalui Bank Indonesia dengan cara mencetak uang, yang berarti jumlah uang yang beredar di perusahaan bertambah atau melebihi pinjaman, baik di dalam negeri. misalnya dengan menerbitkan obligasi, atau dari luar negeri (cara terakhir ini berarti perekonomian tidak lagi tertutup). Karena opsi pertama sangat berisiko meningkatkan laju inflasi, maka opsi kedua sering dipilih.

### Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal sering kali diartikan sebagai kebijakan yang ditujukan untuk mengelola permintaan (Branson, 1989: 75). Pada tingkat operasional, kebijakan fiskal merupakan salah satu alat kebijakan pemerintah pada sisi permintaan yang tergantung pada besar kecilnya anggaran (struktur pajak, belanja publik dan subsidi), dapat digunakan untuk mencapai target produksi, pengangguran dan inflasi pada tingkat tertentu.

Kebijakan fiskal adalah serangkaian langkah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran pajak untuk mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara. Pendapatan fiskal mencakup semua sumber pendapatan pemerintah, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dll. Pemerintah dapat mengubah tarif pajak atau mengenakan pajak baru sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Pengeluaran fiskal mencakup semua pengeluaran pemerintah, seperti belanja publik, program sosial, infrastruktur, pendidikan, dll. Kebijakan fiskal dapat mencakup peningkatan atau penurunan pengeluaran di berbagai bidang. Kebijakan fiskal dapat berbentuk kontrasepsi fiskal ketika pemerintah mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengatasi inflasi atau defisit, dan ekspansi fiskal ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat memiliki dampak sosial, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dampak distribusi pendapatan, yang bisa meningkatkan kesetaraan atau ketidaksetaraan.

Pengertian kebijakan fiskal mencakup sejumlah instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu. Kebijakan ini sering melibatkan keseimbangan antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan pajak untuk menciptakan dampak yang diinginkan pada perekonomian suatu negara.

#### Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk menjaga output mendekati dan stabilitas tingkat harga (dalam kasus perekonomian tertutup, keseimbangan internal). Permintaan yang berlebihan menyebabkan inflasi, sedangkan permintaan yang tidak mencukupi menyebabkan pengangguran sementara dan deflasi. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen politik pemerintah yang berkaitan dengan besaran anggaran pada sisi permintaan (struktur pajak, belanja pemerintah, dan subsidi), Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen politik pemerintah yang berkaitan dengan besaran anggaran pada sisi permintaan. Sehingga tujuan dari kebijakan fiskal (yang tentunya bersamaan dengan kebijakan moneter) adalah untuk memelihara output mendekati full-employment dan stabilitas tingkat harga (keseimbangan internal untuk kasus perekonomian tertutup). Munculnya excess demand akan menyebabkan inflasi, sementara ketidakcukupan dalam permintaan akan menimbulkan pengangguran secara temporer dan deflasi.

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi perkembangan perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi pemerintah ( $G$ ), jumlah transfer pemerintah ( $Tr$ ), dan jumlah pajak ( $Tx$ ) yang diterima pemerintah sehingga dapat

mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N). Kemudian tujuan kebijakan fiskal juga yaitu untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan semakin berkembangnya struktur ekonomi perdagangan dan keuangan, maka cara penanggulangan inflasi pun semakin rumit. Kombinasi yang berbeda harus digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan dan penentuan harga.

Tergantung pada arah perubahan nilai variabel target yang menjadi tujuan kebijakan, ada kebijakan yang bersifat ekspansif dan kontraktif. Kebijakan ekspansif merupakan kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, yang umumnya dilakukan pada masa perekonomian menghadapi banyak pengangguran dan kapasitas produksi nasional belum dalam pemanfaatan penuh. Sedangkan kebijakan kontraktif bertujuan untuk mengurangi kegiatan ekonomi, yang umumnya dilakukan ketika perekonomian dalam keadaan overemployment, yaitu permintaan agregat melampaui besarnya kapasitas produksi nasional.

Kebijakan fiskal memiliki tiga tujuan utama (Sritua Arief, 1996: 287), yakni:

1. Resource allocation, untuk mempengaruhi alokasi sumber ekonomi dan mekanisme harga. Fiskal bertujuan untuk menemukan keseimbangan yang tepat, baik dalam bentuk riil maupun nilai nominal diantara alokasi sumber-sumber ekonomi untuk sektor publik dan opportunity cost pengalihan sumber-sumber ekonomi dari penguasaan pihak swasta.
2. Untuk melakukan proses redistribusi kekayaan dan pendapatan antar golongan ekonomi dalam masyarakat, disini fiskal memiliki tujuan untuk memperoleh keseimbangan antar individu dalam pendapatan bersih.
3. Untuk menentukan arah pertumbuhan dan kestabilan ekonomi nasional, fiskal dikaitkan dalam perubahan output agregat, pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan harga-harga umum. Tugas kebijakan fiskal yaitu mendesign tindakan-tindakan yang dapat melancarkan pemanfaatan penuh sumber-sumber nasional, baik dari sumber daya alam, SDM, maupun sumber keuangan.

Salah satu ahli yang mengemukakan tujuan kebijakan fiskal secara rinci adalah John Maynard Keynes. Keynes adalah seorang ekonom terkemuka yang memainkan peran penting dalam pengembangan teori ekonomi Keynesian. Menurut Keynes, tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

1. Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi: Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal adalah merangsang pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Ini mencakup

penggunaan pengeluaran pemerintah untuk mendorong investasi dan konsumsi dalam perekonomian.

2. Pengurangan: Keynes menganggap pengurangan tingkat pengangguran sebagai tujuan penting. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja melalui investasi pemerintah dalam proyek-proyek infrastruktur dan pekerjaan publik.
3. Stabilisasi Siklus Bisnis: Keynesianisme menekankan pentingnya kebijakan fiskal dalam mengatasi fluktuasi siklus bisnis. Pemerintah harus dapat mengintervensi untuk meredakan tekanan ekonomi selama resesi dan menghindari overheating ekonomi selama periode pertumbuhan yang kuat.
4. Pengendalian Inflasi: Keynes mengakui pentingnya mengendalikan tingkat inflasi. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengurangi inflasi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak ketika terjadi tekanan inflasi.
5. Perlindungan Sosial dan Kesenjangan Pendapatan: Keynesianisme juga menekankan pentingnya perlindungan sosial dan distribusi pendapatan yang adil. Kebijakan fiskal dapat mencakup pajak progresif dan program sosial untuk mengurangi ketidakesetaraan dan memberikan perlindungan ekonomi bagi kelompok yang lebih rentan.

Pandangan Keynes mengenai kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan ekonomi pasca-depresi besar dan telah menjadi dasar bagi banyak strategi ekonomi pemerintah di seluruh dunia. Ia memandang pemerintah sebagai aktor yang aktif dalam mengendalikan aktivitas ekonomi untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan ekonomi.

#### Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal

Risiko fiskal diartikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang penyebabnya adalah sesuatu di luar kendali pemerintah. Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu: peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan kebijakan fiskal, meningkatkan keterbukaan fiskal, meningkatkan tanggung jawab fiskal, menciptakan kesinambungan fiskal.

Menurut Ferry Prasetyia. (2011) risiko fiskal dikelompokkan dalam tiga kategori utama yaitu:

1. Risiko Ekonomi Makro. Dalam penyusunan APBN indikator ekonomi makro yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia dan lifting minyak. Indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan

besar-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Secara umum sumber risiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 2012 terutama berasal dari dua risiko utama, yakni inflasi dan harga minyak.

2. Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat. Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang muncul akibat peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban kontijensi pemerintah pusat yang menjadi risiko fiskal berasal dari pemberian dukungan dan/atau pinjaman pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, kewajiban yang timbul akibat program pensiun dan tabungan hari tua pegawai negeri.
3. Desentralisasi Fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Dalam hal pelaksanaannya, penerapan kebijakan ini selain menghasilkan hal-hal positif sebagaimana yang diharapkan ternyata juga berpotensi menimbulkan risiko fiskal. Risiko dari desentralisasi fiskal yaitu bersumber dari kebijakan pemekaran daerah, tunggakan pemerintah daerah atas pengembalian penerusan pinjaman dari luar negeri dan rekening pinjaman daerah serta pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.

#### Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian di Indonesia

Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia berbeda-beda tergantung pada jenis kebijakan yang diterapkan dan kondisi ekonomi saat itu. Berikut adalah beberapa dampak umum kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia:

1. Pertumbuhan ekonomi: Kebijakan fiskal yang mendukung pengeluaran pemerintah dan investasi dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, kebijakan fiskal yang mengurangi pengeluaran pemerintah dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
2. Pengangguran: Kebijakan fiskal yang mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Namun, jika kebijakan fiskal mengurangi pengeluaran pemerintah secara drastis, hal ini menyebabkan meningkatnya pengangguran.
3. Inflasi: Kebijakan fiskal yang ekspansif, peningkatan pengeluaran pemerintah yang besar, dapat meningkatkan risiko inflasi jika permintaan dari konsumen melebihi

penawaran barang dan jasa. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang kontrasepsioner, seperti pemangkasan anggaran, dapat membantu mengendalikan inflasi.

4. Defisit Anggaran: Kebijakan fiskal yang menghasilkan defisit anggaran (pengeluaran melebihi penerimaan) dapat menyebabkan pemerintah untuk meminjam dana. Dampak defisit ini tergantung pada pengeluaran yang dilakukan. Jika digunakan untuk investasi produktif, hal ini dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang. Namun, defisit yang terus menerus dapat menimbulkan risiko ketidakstabilan ekonomi.
5. Distribusi Pendapatan: Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Pajak progresif atau program sosial yang kuat dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan pajak regresif atau pemotongan pengeluaran yang tidak tepat dapat memperburuk ketidaksetaraan.
6. Investasi: Kebijakan fiskal yang mendukung investasi, khususnya di bidang infrastruktur, dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan menarik investasi swasta.
7. Keuangan Publik: Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kesehatan keuangan publik. Penting untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk menghindari terjadinya defisit anggaran yang berlebihan dan utang yang tidak terkendali.

Dampak kebijakan fiskal juga tergantung pada koordinasi dengan kebijakan moneter dan keadaan ekonomi global. Selain itu, penerapan kebijakan fiskal yang efektif memerlukan perencanaan dan evaluasi yang cermat untuk mencapai hasil yang diinginkan:

John Maynard Keynes berpendapat bahwa kebijakan fiskal dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam periode resesi. Keynes berpendapat bahwa kebijakan fiskal ekspansif dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja melalui investasi pemerintah.

Penting untuk diingat bahwa dampak kebijakan fiskal juga tergantung pada konteks ekonomi dan pelaksanaan kebijakan yang tepat. Selain itu, kebijakan fiskal sering bekerja berdampingan dengan kebijakan moneter dan perlu dipertimbangkan dalam kerangka kebijakan ekonomi yang lebih luas.

#### Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Menurut Rahayu, S. K. (2013), peran kebijakan fiskal dalam perekonomian sebenarnya menunjukkan bahwa volume transaksi yang dilakukan oleh pemerintah kebanyakan negara cenderung meningkat lebih cepat dari pada peningkatan pendapatan nasional. Hal ini berarti bahwa tindakan fiskal pemerintah berperan penting dalam menentukan tingkat

pendapatan nasional yang lebih tinggi. Bagi negara-negara yang sudah maju dalam perekonomiannya, peran tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar pemerintah dapat lebih mampu mempengaruhi perekonomian. Dengan demikian, diharapkan bahwa melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat berusaha untuk menghindari terjadinya keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, seperti tingginya tingkat kemiskinan, inflasi, defisit neraca pembayaran internasional yang berkelanjutan, dan sebagainya.

Bagi negara-negara yang sedang berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari rendahnya investasi yang muncul atas inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan tingkat kehidupan suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk menambah kapasitas produksi nasional, diperlukan adanya pembentukan modal (pembentukan modal). Dengan demikian, berarti masyarakat perlu melakukan investasi yang cukup besar untuk mewujudkan pembentukan modal yang dibutuhkan tersebut.

## SIMPULAN

Kebijakan fiskal adalah serangkaian langkah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran fiskal untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian suatu negara. Pendapatan fiskal ini mencakup semua sumber penerimaan pemerintah, seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak properti, dan lain-lain. Pemerintah dapat mengubah tarif pajak atau menerapkan pajak baru sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Pengeluaran fiskal ini mencakup semua belanja pemerintah, seperti belanja publik, program sosial, infrastruktur, pendidikan, dan sebagainya. Kebijakan fiskal dapat mencakup peningkatan atau pengurangan pengeluaran dalam berbagai sektor. Kebijakan fiskal dapat berbentuk kontrasepsi fiskal ketika pemerintah mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengatasi inflasi atau defisit, dan ekspansi fiskal ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk memelihara output mendekati *full-employment* dan stabilitas tingkat harga (keseimbangan internal untuk kasus perekonomian tertutup). Menurut Rahayu, S. K. (2013) peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian sebenarnya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan negara cenderung meningkat lebih cepat daripada pendapatan nasional yang meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hardinandar, F. (2020). Peran Kebijakan Fiskal terhadap Trade-Off antara Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia. *Inovasi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 1-10.
- Helianny, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. *Prosiding Seminar Stiarni* , 15-21.
- Indra Maipita, M. D. (2010). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Dan Angka Kemiskinan Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 422-456.
- Irwan, E. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)*, 01-08.
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *E-Journal System IAIN Bengkulu (Institut Agama Islam Negeri)*, 102-118.
- Kinerja. (2002). Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung.
- Maipita, I. (2014). Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan. Medan: UPP STIM YKPN.
- MR Taufikurohman, R. O. (2011). Dampak Kebijakan Fiskal Untuk Subsidi Pangan Terhadap Ekonomi . *Jurnal Sosial Humaniora*, 171-182.